

OKI tak Bahas Uighur di Dewan HAM PBB

REPUBLIKA — 28 Feb '19 (1)

● FITRIYAN ZAMZAMI, LINTAR SATRIA

JENEWA — Dewan HAM Perse-rikatan Bangsa-Bangsa menggelar pertemuan tahunan utama ke-40 di Jenewa, Swiss, yang akan berlang-sung dari 25 Februari hingga 22 Ma-ret nanti. Dalam pertemuan tingkat tinggi pada forum tersebut, Organi-sasi Kerja Sama Islam (OKI) yang diharapkan angkat suara soal nasib Muslim Uighur di Xinjiang, RRC, tak menyentuh isu tersebut.

Dalam pidatonya pada Selasa (26/2) waktu setempat, Sekretaris Jenderal OKI Yousef al-Othaimeen

menekankan komitmen OKI mengecam diskrimi-nasi rasial dan religius serta merebaknya Islamofobia. Kendati demikian, tak di-sebutkan negara atau etnis tertentu yang dikecam atau dibela OKI.

Meski secara khusus, al-Othaimeen menyinggung soal Rohingya. "OKI sepakat dengan komentar dari komi-sioner tinggi bahwa ada bukti terjadi kejahatan kemanusiaan dan kita harus melakukan semua upaya untuk meng-akhiri konflik (di Myanmar)," kata dia di hadapan para menteri luar negeri



Indepth

Perlu Solusi Adil
di Xinjiang

Hlm-9

dan diplomat yang hadir.

Al-Othaimeen juga me-ngatakan, OKI menilai bahwa pelanggaran terhadap hak-hak penentuan nasib sendiri (*self determination*) merupa-kan pintu menuju penindasan lainnya. "Saat ini kita melihat

minoritas di Kashmir dan di negara-negara Asia lainnya yang dilanggar hak mereka terkait penentuan nasib sendiri," ujar al-Othaimeen.

Ia mengatakan, OKI mengecam serangan terorisme yang menewas-kan puluhan tentara India di Kashmir dan mendesak dirancangnya solusi

untuk mengkhiri kekerasan di wila-yah tersebut.

Ia juga mengecam penjajahan di Palestina dan mendesak Dewan HAM PBB menemukan solusi berkelanjut-an untuk konflik negara tersebut me-lalui pembentukan dua negara mer-deka dan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina.

Sementara itu, Menteri Luar Ne-geri RI Retno LP Marsudi yang ber-bicara pada forum yang sama membuka pidatonya dengan menya-takan bahwa situasi penegakan HAM

di dunia sedang dalam kondisi yang menantang. "Berbagai konflik dan instabilitas telah menimbulkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia," katanya di Jenewa, Selasa (26/2).

Menlu RI kemudian menyinggung soal kondisi di Palestina. "Dukungan untuk kemerdekaan Palestina tak boleh berhenti. Indonesia akan selalu mendukung Palestina memperoleh hak-hak mereka," ujar Menlu RI.

Ia juga mengajukan kesediaan RI menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2020-2022 agar bisa berkontribusi langsung terhadap penegakan HAM. Menurut dia, ada sejumlah platform yang ditawarkan Indonesia terkait perlindungan HAM di dunia.

Pertama, kata Menlu RI, Dewan HAM PBB harus bekerja secara imparial, objektif, dan tak terganggu politisasi agar bisa kembali dipandang sebagai lembaga utama terkait penegakan HAM. Kemudian, kerja sama regional terkait penegakan HAM harus dikuatkan. Ia mencontohkan, Indonesia telah mengambil langkah konkret terkait situasi kemanusiaan di Rakhine dan mengupayakan penyelesaian jangka panjang.

Retno juga menekankan, penegakan HAM di dunia harus dimulai dari rumah masing-masing. "Tak ada negara, saya ulangi, tak ada satu negara pun yang punya rekam jejak HAM yang sempurna. Bagaimanapun, ini tak semestinya menahan kita dari memajukan agenda penegakan HAM," kata dia. Pada akhir pidatonya, Menlu RI meminta dukungan negara-negara lain untuk mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB 2020-2022.

Pada forum sesi utama sehari sebelumnya, Turki dan Inggris menyuarakan keprihatinan

mereka atas perlakuan buruk Pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur dan komunitas Muslim lainnya di Xinjiang. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu meminta Beijing untuk melindungi kebebasan beragama dan identitas budaya masyarakat Uighur.

Cavusoglu tidak menyebutkan secara spesifik penahanan Muslim Uighur di Xinjiang. Namun, di depan negara-negara anggota PBB lainnya dalam forum tersebut ia mengatakan laporan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami etnis Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang sangat memprihantinkan. "Harus ada jarak pembeda antara teroris dan rakyat tidak bersalah," ujar Cavusoglu, Selasa (26/2).

Ia menekankan, Turki menghormati keutuhan wilayah RRC, termasuk atas Taiwan, Tibet, dan Xinjiang. Kendati demikian, mereka meminta otoritas RRC tetap menjunjung HAM. "Kami mendorong otoritas Cina menghormati hak asasi manusia universal dan kebebasan beragama serta melindungi sepenuhnya identitas budaya Uighur dan umat Islam," kata dia.

Negara-negara Barat yang telah lebih dulu melancarkan protes ke RRC pada pertemuan kali ini mengandalkan Turki dan negara anggota OKI lainnya untuk menyoroti kondisi di Xinjiang dan tudingan soal pelanggaran HAM dalam kamp-kamp reedukasi di sana.

Inggris satu-satunya negara yang bergabung dengan Turki yang ingin membahas isu tersebut. "Kami sangat risau dan khawatir atas apa yang terjadi terhadap Muslim Uighur di Xinjiang," ujar Menteri Luar Negeri dan Persemakmuran Lord Ahmad dalam forum yang sama.

Kecaman Turki dan Inggris itu terkait temuan lembaga HAM

internasional soal indikasi penahanan jutaan Muslim Uighur dalam kamp-kamp reedukasi. Temuan yang juga sebelumnya dikutip Dewan HAM PBB menuding bahwa terjadi indoktrinasi dan penganiayaan terhadap para tahanan. Sementara, Pemerintah RRC mengatakan kamp itu sebagai fasilitas vokasi dan pelatihan.

Republika yang menyertai delegasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) ke Xinjiang pekan lalu tak menyaksikan ada bukti-bukti fisik soal indoktrinasi ataupun penganiayaan di kamp-kamp vokasi.

Kendati demikian, sejumlah peserta yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka direkomendasikan mengikuti pendidikan hanya karena menjalankan perintah agama. Pilihan jika tak mengikuti pendidikan vokasi, menurut pejabat setempat, adalah dijebloskan ke penjara. *Republika* juga menemukan bahwa dalam kamp para peserta sama sekali tak boleh melaksanakan shalat.

Sementara itu, RRC telah melayangkan keberatan terhadap sikap Turki di Dewan HAM PBB, Rabu (27/2). Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RRC, Lu Kang, menyatakan, sebagian orang dari Turki belakangan sengaja mengabaikan fakta tentang Xinjiang dan melayangkan tudingan tak bertanggung jawab.

Menurut Lu Kang, pemerintah daerah Xinjiang telah mengambil langkah-langkah guna menjamin warga mereka hidup secara normal dan mematuhi hukum serta menghindari radikalisme. "Dan, langkah-langkah ini telah berjalan efektif selama 25 bulan terakhir, terbukti dengan tak adanya serangan terorisme," kata Lu Kang di Beijing, seperti dilansir *Reuters*, kemarin. ■ *reuters* ed: fitriyan zamzami